

KAJIAN PENINGKATAN KESEMPATAN DALAM MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN DASAR BAGI ANAK USIA 7--15 TAHUN

Oleh:
Nur Berlian VA¹ dan Nanik Suwaryani²

Abstrak:

Anak 7--15 tahun masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dasar (Dikdas). Tujuan penelitian: (1) mengidentifikasi karakteristik anak 7--15 tahun yang belum terlayani oleh program Dikdas; (2) mengidentifikasi faktor penyebab; (3) mengidentifikasi program-program Dikdas yang ada; (4) mengidentifikasi kebutuhan pendidikan bagi mereka; dan (5) mengidentifikasi cara-cara memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif pada kabupaten yang memiliki APK SMP/setara yang rendah. Temuan: (1) Anak usia 7--15 tahun tidak sekolah didominasi oleh anak yang sudah tamat SD/MI, tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah saling berkaitan di antara faktor ekonomi, jarak dari rumah ke sekolah, motivasi, dan faktor budaya; (3) rasio jumlah SD/MI per desa rata-rata 2, sedangkan SMP/setara hanya 0.6; (4) pendidikan yang dibutuhkan adalah yang menarik bagi siswa, dan berguna untuk bekal hidup; (5) strategi sekaligus rekomendasi adalah pendekatan kepada yang ditokohkan, *multigrade-teaching*, dan komprehensif.

Kata Kunci: Pendidikan Dasar, 7--15 tahun

Abstract:

Children 7-15 years are still many un-served by basic education (compulsory basic education). Objectives: (1) To identify the characteristics of a child 7-15 years who have not served by the compulsory basic education program, (2) To identify the causes, (3) To identify the compulsory basic education programs that exist, (4) To identify educational needs for them, and (5) To identify ways to meet educational needs as appropriate. Research using qualitative approaches in the district whose have GER junior high / low equivalent. Findings: (1) Children aged 7-15 years not dominated by school children who have graduated from primary schools, but did not continue into junior high schools, (2) The factors that cause the child's school is not related to each other between economic factors, distance from home to school, motivation, and cultural factors, (3) the ratio of the number of primary schools per village average of 2, while junior / equal to only 0.6, (4) education that is required is that appeal to students, and useful for stock life; (5) strategies as well as the recommendation is to approach featured, multi grade-teaching, and involve many stakeholders.

Keywords: Basic Education, 7 - 15 years

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Depdiknas pada awal tahun 2009 mencanangkan bahwa secara nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun telah dinyatakan tuntas yang didasarkan pada pencapaian APM SD/setara dan APK SMP/setara sudah melampaui angka di atas 95 persen. Namun, apabila ditinjau pada tingkat provinsi dan apalagi pada tingkat

¹ Nur Berlian VA, MSE adalah Peneliti pada Puslitjaknov, Balitbang Kemdiknas

² Nanik Suwaryani, Ph.D. adalah Perekayasa pada Puslitjaknov, Balitbang Kemdiknas

kabupaten, masih banyak daerah yang belum menuntaskan Wajar Dikdas. Kesenjangan pencapaian antarprovinsi dan terlebih lagi antarkabupaten/kota ditemukan masih tinggi. Indikator pencapaian Wajar Dikdas pada tingkat makro dan meso tersebut sangat dipengaruhi oleh pencapaian di tingkat mikro, yaitu kontribusi dari anak-anak usia Dikdas (7--15 tahun) yang bersekolah.

Pada era perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa masih banyak kelompok anak warga bangsa kita yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan yang ada (*the unreached group*). SEAMEO-UNESCO (MoNE, 2008) memberikan pengertian kelompok *the unreached* ke dalam 11 kategori sebagai berikut:

- 1) tinggal di daerah terpencil;
- 2) tinggal bersama masyarakat budaya terpencil;
- 3) perempuan dan para ibu yang tinggal di daerah terpencil;
- 4) rawan putus sekolah;
- 5) hidup berpindah-pindah, tinggal di pengungsian, tanpa identitas penduduk;
- 6) anak jalanan, korban perdagangan anak,
- 7) anak yang tinggal di daerah konflik, bencana, atau penjara;
- 8) anak yatim piatu dan tidak terpelihara;
- 9) anak dari keluarga miskin;
- 10) mempunyai kebutuhan khusus, termasuk mereka yang menyandang cacat; dan
- 11) menyandang HIV/AIDS.

Selain ke -11 kategori tersebut, pada kasus di Indonesia ditambahkan satu kategori lainnya, yakni anak atau penduduk yang tinggal di daerah perbatasan dan bekerja sebagai TKI/TKW. Kelompok anak yang belum terlayani pendidikan dapat tersebar di berbagai wilayah, baik di perdesaan dan daerah terpencil maupun di perkotaan. Kelompok-kelompok ini perlu diidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta pendidikan seperti apa yang mereka butuhkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Selama ini mereka tak terjangkau oleh layanan pendidikan yang ada, baik melalui jalur formal maupun nonformal, termasuk berbagai program alternatif yang ada yang diselenggarakan pemerintah ataupun masyarakat. Program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, SMP Terbuka, SD kecil, SD-SMP Satu Atap, SD Pamong, atau bentuk-bentuk pendidikan layanan khusus yang diprakarsai pihak swasta, seperti sekolah rimba, sekolah anak-anak miskin, gelandangan, dan anak jalanan karena satu dan lain sebab nampaknya baru diakses oleh sejumlah kecil anak-anak yang mempunyai kondisi hidup sangat sulit. Untuk itu, perlu suatu kajian dalam rangka lebih mengefektifkan program yang ada atau memperbaiki program layanan pendidikan agar dapat lebih menyentuh masyarakat yang belum mendapat layanan pendidikan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Kondisi yang memiliki sejumlah anak yang belum terlayani pendidikan dasar memunculkan pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana sampai mereka tidak terlayani. Secara lebih khusus pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana jenis-jenis dan karakteristik kelompok anak usia Dikdas yang selama ini belum terlayani oleh pendidikan dasar?
- 2) Faktor-faktor apa penyebab belum terlayannya kelompok anak usia Dikdas tersebut oleh program pendidikan dasar yang ada?
- 3) Bagaimana program-program pendidikan dasar yang ada di sekitar lingkungan kelompok anak usia Dikdas tersebut?
- 4) Apa yang menjadi kebutuhan utama dan kebutuhan pendidikan mereka?
- 5) Bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh alternatif bahan kebijakan dalam rangka meningkatkan layanan Dikdas bagi anak-anak berusia 7--15 tahun yang selama ini belum terlayani. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, ditetapkan tujuan khusus penelitian, yaitu

- 1) mengidentifikasi jenis-jenis dan karakteristik kelompok anak usia Dikdas yang selama ini belum terlayani oleh pendidikan dasar;
- 2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum terlayannya kelompok anak usia Dikdas tersebut oleh program pendidikan dasar yang ada;
- 3) mengidentifikasi program-program pendidikan dasar yang ada di sekitar lingkungan kelompok anak usia Dikdas tersebut;
- 4) mengidentifikasi kebutuhan utama dan kebutuhan pendidikan mereka; dan
- 5) mengidentifikasi cara-cara memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka.

II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Beruntung

Pendidikan mutlak perlu untuk mendapatkan prioritas *investasi human capital* karena pendidikan termasuk pendidikan dasar memberikan kontribusi lebih nyata dan besar terhadap perubahan masyarakat. Tilaar (2000) menyebutkan manfaat sosial dari suatu investasi pendidikan untuk tingkat SD di kawasan Asia terukur sebesar 27 persen, sedangkan tingkat menengah sebesar 15 persen, dan pendidikan tinggi sebesar 13 persen. Lebih lanjut penelitian Lockheed (1987) menunjukkan besarnya nilai balik sosial investasi pendidikan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa dari 35 negara yang disurvei nilai balik sosial investasi di sektor pendidikan dasar cukup tinggi yaitu 27 persen.

Selanjutnya, Freire (1989) menyatakan bahwa pendidikan merupakan praktik pembebasan. Artinya, pendidikan merupakan wahana atau tempat untuk pembebasan manusia dari keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Pendidikan menanamkan kapasitas baru untuk belajar serta keterampilan sebagai model manusia produktif lainnya. Pendidikan dipercayai sebagai wahana untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Pendidikan juga diyakini mampu berperan sebagai salah satu instrumen untuk memberantas kemiskinan, selama apa yang peserta didik lakukan itu relevan dengan kebutuhan dan tantangan hidup mereka.

Pendidikan dasar universal (*universal basic education*) merupakan asas yang dianut oleh Indonesia di dalam menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, yang intinya adalah wawasan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan dasar. Begitu pula semangat pendidikan untuk semua orang (*education for all*) ternyata mendorong Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan dasar untuk semua kelompok masyarakat, termasuk juga bagi golongan masyarakat kurang beruntung yang disebabkan oleh keterbatasan akses yang mencakup masalah tempat tinggal (kondisi geografis, daerah bencana sosial dan/atau alam, perbatasan), adat terpencil, dan keterbatasan dari segi ekonomi.

Melalui prinsip peluang pendidikan yang sama bagi semua orang (*equal opportunity of education for all*), program pendidikan pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat menjadi wahana untuk memberikan kesempatan pendidikan, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu dipahami karena realitas sosial yang muncul ke permukaan menunjukkan adanya keberpihakan pelayanan pendidikan yang bersumber dari kesenjangan sosial. Kesempatan pendidikan dan pelayanan pendidikan yang bermutu lebih menjadi milik sekelompok kecil masyarakat, sementara kelompok masyarakat kurang beruntung tidak mampu menjangkau pendidikan yang bermutu, dan dalam derajat tertentu, bahkan tidak sempat mengenyam pendidikan. Dengan kenyataan ini, akses kelompok masyarakat kurang beruntung untuk memasuki kenchah dunia kerja semakin tertutup dan ketinggalan. Mereka masih saja terpuruk menjadi tenaga kasar yang dibayar murah karena memang tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai mereka tidak mungkin bisa bekerja pada aras yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan dan kemiskinan memiliki korelasi yang signifikan, dalam arti semakin rendah tingkat pendidikan seseorang peluang mengalami kemiskinan semakin tinggi.

Penyelenggaraan program pendidikan dasar 9 tahun cenderung masih bersifat klasik, dalam arti masih mengandalkan model tatap muka di kelas dan warga belajar harus hadir secara penuh dalam waktu satu minggu. Hal ini kurang menguntungkan bagi anak-anak dari masyarakat kurang beruntung. Dari kenyataan itu perlu dicari upaya baru tentang pola penyelenggaraan pendidikan yang lebih membuka kemungkinan luas bagi anak-anak dari kelompok kurang beruntung. Hal ini dimaksudkan agar

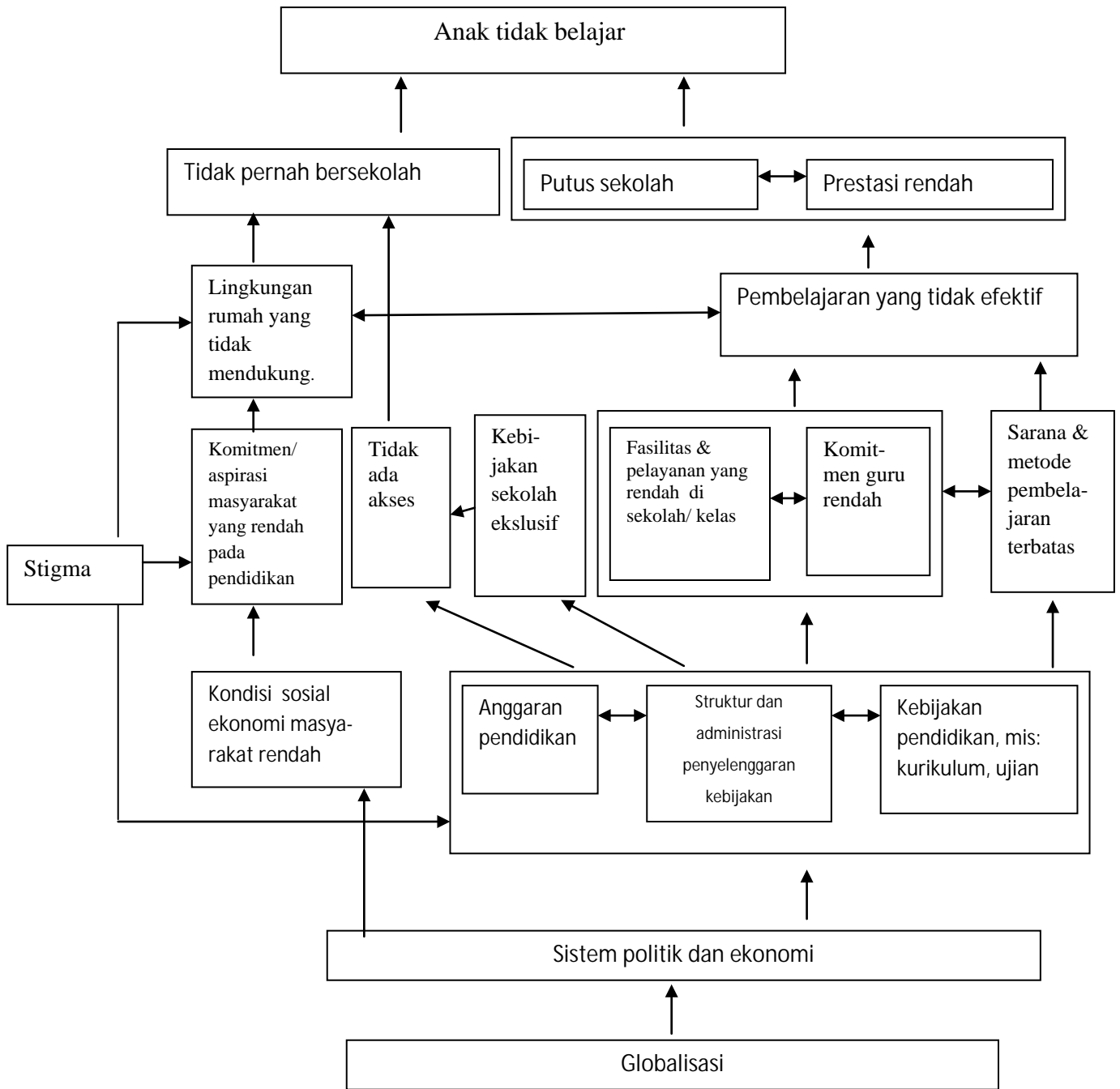
mereka memperoleh peluang layanan pendidikan yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan yang ada.

Bagi masyarakat kurang beruntung, meskipun mereka memiliki pengertian yang cukup tentang arti pentingnya pendidikan, mereka memiliki keterbatasan kemampuan dan daya dukung yang mereka miliki sehingga mengakibatkan pendidikan dipandang sebagai barang mewah yang tidak mudah dijangkau. Hal ini juga terjadi pada kelompok masyarakat di daerah-daerah yang memerlukan pendidikan layanan khusus, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terbelakang, daerah perbatasan, daerah kepulauan kecil, masyarakat adat di daerah terpencil, daerah bencana alam, daerah bencana sosial, di samping kelompok masyarakat miskin, yaitu masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa jika penyelenggaraan program pendidikan dasar 9 tahun hanya mengacu pada ketentuan pemerintah tanpa memperhatikan atau memperhitungkan kondisi khas kelompok masyarakat masing-masing di suatu wilayah, akan berpeluang besar mengalami kegagalan. Pendeknya, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun membutuhkan kelenturan program dengan memperhatikan faktor-faktor dominan dan sumber daya masyarakat yang ada di wilayah yang bersangkutan. Adanya kelenturan program memungkinkan ditemukannya cara-cara baru, media baru, dan pola-pola baru dalam menyelenggarakan program pendidikan dasar. Demikian pula, jika program pendidikan dasar 9 tahun tidak didukung oleh partisipasi masyarakat, niscaya program itu mampu mencapai target keberhasilan yang telah ditetapkan.

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Terlayannya Masyarakat oleh Pendidikan

Untuk sampai akhirnya seorang anak tidak belajar, banyak kemungkinan factor yang menyebabkannya. Faktor-faktor itu seringkali saling berkaitan, ada yang langsung dan tidak langsung. Kompleksitas penyebab tidak belajarnya anak ini dapat diilustrasikan pada Bagan 1 yang diadopsi dari hasil pengkajian pemerintah Indonesia – UNICEF (2000) di dalam Suwaryani (2008). Pada bagan itu seorang anak tidak belajar bisa diindikasikan oleh tiga hal: (1) yang bersangkutan tidak pernah bersekolah; (2) pernah mendaftar di sekolah, tapi akhirnya putus sekolah; dan (3) bertahan di sekolah, tapi anak itu tidak belajar apa-apa baik dari sisi akademik maupun nonakademik. Tanpa mengabaikan pentingnya mengkaji anak-anak dengan indikator ketiga, penelitian ini lebih menfokuskan pada anak-anak yang tidak pernah bersekolah dan yang putus sekolah. Anak-anak tersebut disebut sebagai kelompok *the unreached*.



Gambar 1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak belajar

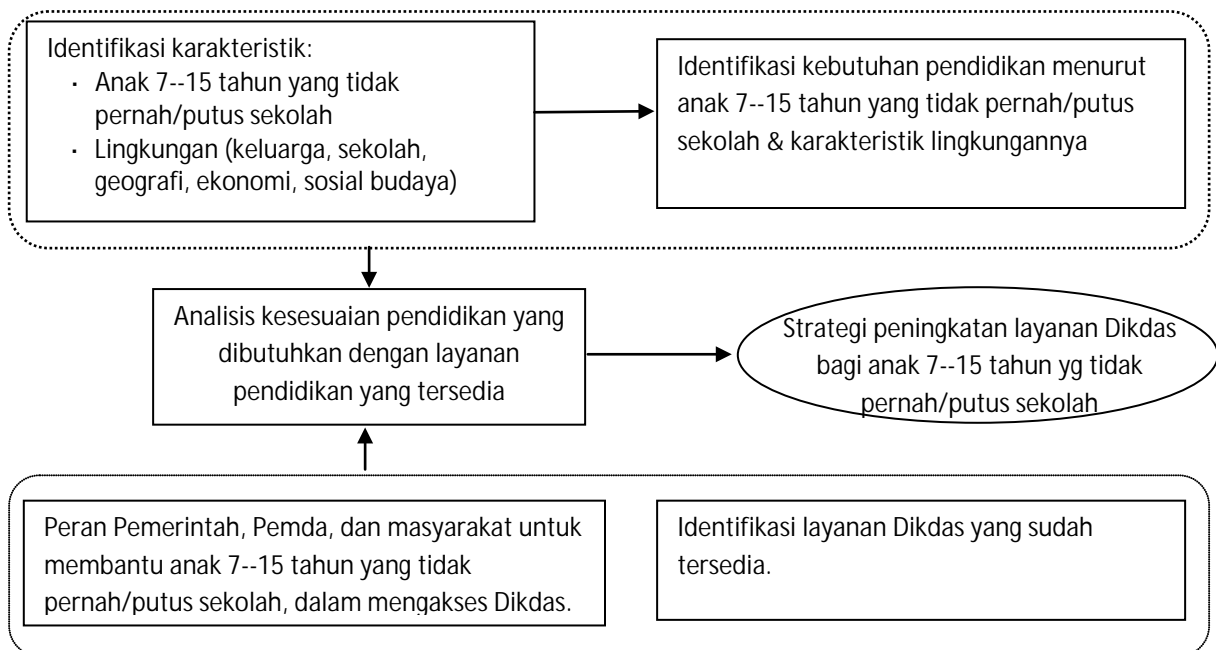
B. Kerangka Berpikir

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kerangka pikir studi menggunakan pendekatan dari sisi pihak yang dilayani kebutuhan pendidikan (*demand*) dan penyedia (*supply*). Dari sisi *demand*, pengkajian diawali dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristik kelompok warga masyarakat, khususnya anak usia Wajar Dikdas (7--15 tahun) yang belum terlayani oleh pendidikan dasar. Karena pelayanan pendidikan akan selalu terkait dengan lingkungan, faktor lingkungan di sekitarnya kelompok masyarakat tersebut juga perlu diketahui, antara lain faktor geografis, ekonomi (mata pencaharian), dan sosial budaya. Pada akhirnya, sasaran yang akan dituju dari sisi users adalah menemukan bentuk-bentuk layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan dan potensi mereka.

Pada sisi penyedia layanan (*supply*), selama ini baik pemerintah maupun masyarakat telah memberikan berbagai layanan pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Namun, belum diketahui dengan pasti seberapa jauh layanan-layanan tersebut dapat mengakses warga masyarakat tersebut. Apakah model-model layanan pendidikan yang ada saat ini belum cukup efektif untuk menjangkau mereka, atau perlu model-model layanan pendidikan lainnya yang dapat secara lebih efektif menjangkau mereka yang belum terjangkau. Informasi tersebut dapat dilengkapi oleh informasi kebijakan dan program atau peran yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan.

Pendekatan dari sisi *demand* (penduduk yang memerlukan pendidikan) merupakan pendekatan utama dan pertama, karena untuk keperluan pemberian layanan kepada merekalah, sisi *supply* meratakan dan memperluas akses terhadap pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir pengkajian diilustrasikan oleh gambar berikut.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Studi

III. METODOLOGI

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi kelompok anak yang tidak terjangkau oleh pendidikan melalui pendekatan studi kasus, yaitu menelaah secara mendalam segala aspek, mengapa ada kelompok anak yang belum terlayani oleh pendidikan, terutama pada tingkat wilayah kecamatan yang memiliki banyak anak tidak sekolah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Karakteristik kelompok anak usia 7 s.d. 15 tahun (usia Dikdas) yang selama ini belum terlayani oleh pendidikan dasar.
2. Faktor-faktor penyebab belum terlayananya kelompok anak usia Dikdas oleh program pendidikan dasar.
3. Program-program pendidikan dasar yang ada di sekitar lingkungan kelompok anak usia 7 s.d. 15, baik pendidikan konvensional maupun pendidikan layanan khusus (SMP Terbuka, Sekolah satu atap, dll)
4. Kebutuhan utama dan kebutuhan pendidikan anak usia 7 s.d. 15 tahun. Kebutuhan ini didasarkan pada kebutuhan nyata (*real needs*) dan kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) oleh anak usia 7 s.d. 15 tahun yang terkait dengan pendidikan.
5. Strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka.

C. Sasaran Lokasi dan Informan Penelitian

1. Sasaran Lokasi
 - a. Kabupaten
Kabupaten yang dijadikan sasaran lokasi penelitian adalah kabupaten yang memiliki kategori pencapaian APK SMP/setara sangat rendah atau lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rerata nasional 92.52% (Pusat Statistik Pendidikan, 2008), serta berstatus sebagai kabupaten tertinggal menurut kategori Kementerian Percepatan Daerah tertinggal. Kabupaten yang dijadikan lokasi studi berjumlah tujuh kabupaten yang tersebar di wilayah Kawasan Barat Indonesia dan Pulau Jawa (Kabupaten Bengkulu Selatan, Bangka Selatan, Garut, dan Sampang), serta Kawasan Indonesia Timur (Kabupaten Sambas, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sumba Barat).
 - b. Kecamatan
Di setiap kabupaten terpilih, ditentukan secara purposif lokasi kecamatan dengan kriteria: kecamatan tertinggal dan memiliki anak usia 7--15 tahun yang tidak sekolah (tidak sekolah sama sekali, DO SD/setara, tidak lanjut dari SD/setara ke SMP/setara, dan DO SMP/setara) yang tinggi (paling tinggi atau lebih dari rata2 kabupaten)
 - c. Desa
Lokasi desa yang dijadikan sasaran adalah satu desa tertinggal dan memiliki anak usia 7--15 tahun yang tidak sekolah (tidak sekolah sama sekali, DO SD/setara, tidak lanjut

dari SD/setara ke SMP/setara, dan DO SMP/setara) yang tinggi (paling tinggi atau lebih dari rata-rata kecataman).

d. Sekolah/Madrasah/Program Paket Sasaran

SD/MI yang menjadi sasaran adalah yang berlokasi di desa sasaran, demikian pula halnya untuk SMP/MTs, SD-SMP Satu Atap, Tempat Kegiatan Belajar (TKB) SMP Terbuka, dan Program Paket B. Namun, jika di desa sasaran tidak ada SMP/MTs, SD-SMP Satu Atap, Tempat Kegiatan Belajar (TKB) SMP Terbuka, dan Program Paket B, maka bisa diambil dari lokasi desa lain.

2. Informan Penelitian

a. Orang tua dan Anak tidak sekolah

Orang tua dan anak usia 7--15 tahun tidak sekolah yang menjadi sasaran adalah yang bertempat tinggal di desa sasaran. Kriteria anak yang tidak sekolah diusahakan bervariasi, yaitu (i) anak yang tidak sekolah sama sekali; (ii) anak DO SD/setara; (iii) anak tidak melanjutkan dari SD/setara ke SMP/setara; dan (iv) anak DO SMP/ setara. Untuk setiap kriteria diwakili 2 orang, tetapi jika tidak semuanya lengkap, bisa dialihkan ke kriteria (iii). Dengan demikian, jumlah orang tua dan anak yang diwawancarai berjumlah 8 orang per kabupaten.

b. Kepala Sekolah, Guru Pamong TKB SMPT, dan Penyelenggara Program Paket B

Ø Kepala SD/MI dipilih dari asal sekolah sasaran dengan jumlah 2 orang, bisa duaduanya dari SD atau salah satunya dari MI.

Ø Kepala SMP/MTs, dan SMP Satu Atap, masing-masing diambil satu orang.

Ø Guru pamong TKB SMPT dan Penyelenggara Paket B diambil masing-masing satu orang.

c. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat dipilih dari tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain yang ada di desa sasaran, dan kecamatan sasaran, masing-masing berjumlah 1--2 orang.

C. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data di lokasi studi, digunakan beberapa instrumen pengumpulan data, yaitu daftar isian, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan. Secara terperinci instrumen penelitian yang digunakan adalah

1. Daftar Isian Kabupaten;
2. Daftar Isian Kecamatan dan Pedoman Pengamatan;
3. Pedoman wawancara Kepala Cabang Disdik Kecamatan;
4. Pedoman wawancara kepala SD/SMP;
5. Pedoman wawancara kepala SD-SMP Satu Atap;
6. Pedoman wawancara guru Pamong TKB/SMP Terbuka;
7. Pedoman wawancara Penyelenggara Paket B;
8. Pedoman wawancara Tokoh Masyarakat;
9. Pedoman wawancara Orang tua anak yang Tidak sekolah;

10. Pedoman wawancara anak yang tidak sekolah
Selain itu, digunakan juga alat perekam dan kamera.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul dari lokasi studi dikelompokkan ke dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk penyajian data dengan tabel dan grafik. Adapun data dan informasi kualitatif dianalisis melalui tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan simpulan/verifikasi. Berdasarkan analisis data, baik deskriptif maupun kualitatif, disusun strategi layanan pendidikan dasar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Strategi layanan ini sifatnya kasuistis, disesuaikan dengan karakteristik siswa dan daerah yang bersangkutan.

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik kelompok anak usia 7 s.d. 15 tahun (usia Dikdas) yang selama ini belum terlayani oleh pendidikan dasar.

1. Profil Anak Tidak Sekolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 56 orang informan anak yang tidak sekolah di tujuh kabupaten, diketahui bahwa tingkat pendidikan mereka sebagian besar adalah tamat SD/MI tetapi karena berbagai faktor mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs (51,11%). Persentase terbesar kedua adalah DO SD/MI (33.33%) dan persentase terendah adalah DO SMP/MTs (15.56%).

Di beberapa lokasi penelitian dijumpai bahwa alasan anak tidak sekolah adalah karena tuntutan ekonomi, sehingga mereka harus bekerja membantu orang tua. Anak-anak yang tidak sekolah itu ternyata harus bekerja (53.33%), baik untuk membantu ekonomi keluarga/orang tua maupun untuk pendapatan anak yang bersangkutan. Adapun mereka yang menganggur atau tidak mempunyai aktivitas yang menghasilkan finansial sebesar 46.67 persen. Tugas mereka adalah membantu orang tua misalnya mengasuh adik-adiknya di rumah. Bagi anak yang bekerja, umumnya mereka bekerja secara serabutan dan tidak tetap.

Aspirasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang tidak sekolah ini sebenarnya erat kaitannya dengan kondisi riil di lapangan. Sebagian anak tetap mengatakan bahwa mereka ingin sekolah meskipun juga ada yang mengatakan bahwa pendidikan di SD/MI saja telah cukup.

Aspirasi tentang pentingnya pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran orang tua dan kondisi sosial budaya setempat. Bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang tidak tersedia lapangan kerja, anak masih mempunyai kecenderungan yang murni untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMP/MTs. Namun, untuk daerah-daerah yang cukup tersedia lapangan pekerjaan, seperti di lingkungan penghasil timah, perkebunan sawit dan

karet, atau daerah perbatasan dengan negara tetangga, maka pola pemikiran anak untuk harus menamatkan pendidikan sampai SMP/MTs terlebih dahulu telah terkikis oleh godaan memperoleh penghasilan apabila mereka bekerja. Dengan demikian, di daerah-daerah yang tersedia lapangan pekerjaan pada sektor non formal ini anak-anak yang tidak sekolah mempunyai kecenderungan untuk cepat-cepat memperoleh pekerjaan.

2. Profil Orang Tua Anak yang Tidak Sekolah

Orang tua dari anak-anak yang tidak sekolah juga berpendidikan rendah. Persentase terbesarnya adalah mereka yang tidak sekolah dan tidak tamat SD/MI (65%), kemudian diikuti oleh lulus SD/MI (33%), dan tidak tamat SDMP (2%), sedangkan yang lulus SMP/MTs tidak ada (0%). Kondisi demikian dimungkinkan sangat memberikan kontribusi terhadap pendidikan anak-anaknya.

Rata-rata jumlah anak pada keluarga yang terdapat anak-anak yang tidak sekolah di lokasi penelitian pada umumnya lebih dari 5 orang. Apabila ditelusuri lebih jauh, di beberapa keluarga, misalnya di Kecamatan Galing, Sambas dijumpai terdapat delapan anak bersaudara yang rata-rata tidak tamat SD/MI. Kondisi ini sangat dimungkinkan berkaitan dengan pendidikan orang tuanya yang juga tidak tamat SD/MI dan juga akan berkaitan dengan penghasilan keluarga.

Makna yang paling penting dari fenomena ini adalah generasi yang tidak memperoleh pendidikan yang cukup juga akan melahirkan generasi penerus yang pendidikannya juga tidak cukup.

Pendidikan dan pekerjaan merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat. Pendidikan yang memadai akan menghadirkan pekerjaan yang baik, dan demikian sebaliknya. Pekerjaan informan orang tua dari anak yang tidak sekolah sebagian besar (62%) bekerja sebagai petani dan/atau nelayan serta 32% sebagai buruh (tani dan pekerjaan informal lainnya), dan 6% sebagai pedagang.

Apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat pendidikan orang tua yang telah disebutkan di depan, sangat dimungkinkan bahwa dengan pendidikan yang maksimalnya tidak lulus SD/MI itu, jenis pekerjaan yang bisa didapatkan adalah sebagai buruh petani dan nelayan saja.

Jika ditinjau dari penghasilan yang diperoleh per bulan, hal itu sangat bergantung pada jenis pekerjaannya. Artinya, pekerjaan yang lebih baik sangat berkontribusi terhadap penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Umumnya, orang tua dari anak yang tidak sekolah memiliki penghasilan yang tidak tentu dalam setiap bulannya. Namun, jika tingkat penghasilan mereka dirata-ratakan persentase terbesar (45%) informan orang tua dari anak yang tidak sekolah berpenghasilan tidak lebih dari Rp 300.000 per bulan, dan persentase terbesar berikutnya (29%) adalah berpenghasilan antara Rp300 ribu hingga Rp 500 ribu, dan hanya 26% yang memiliki penghasilan di atas Rp500 ribu per bulan.

B. Faktor-faktor penyebab belum terlayannya kelompok anak usia Dikdas oleh program pendidikan dasar yang ada.

Ada berbagai kemungkinan faktor yang menyebabkan seorang anak akhirnya putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya dan berbagai penyebab itu seringkali berkaitan. Dari berbagai faktor itu faktor ekonomi merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap putus sekolah. Namun, faktor ekonomi ini tidak mesti berkaitan dengan ketidakmampuan orang tua membiayai anaknya ke sekolah, ia bisa merupakan akibat dari pilihan anak untuk bekerja dan mendapatkan uang.

Untuk yang berkaitan dengan kemiskinan, walaupun pada tingkat pendidikan dasar tidak lagi dipungut biaya, ada pengeluaran-pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan orang tua seperti untuk seragam, buku, dan biaya transportasi. Hal ini didukung hasil studi BOS yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang menemukan bahwa pada tahun 2006/2007 ada 73% sekolah (SD dan SMP) yang tidak memungut biaya. Jumlah itu menurun pada tahun 2007/2008 menjadi sebesar 50% (Puslitjaknov 2007, Puslitjaknov 2008). Walaupun jumlah mereka yang putus sekolah karena miskin mungkin tidak banyak, sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa mereka sebetulnya masih berminat untuk bersekolah. Kondisi ekonomi keluarga merekalah yang akhirnya memaksa mereka untuk bekerja dan tidak bersekolah.

Sementara itu, hilangnya *opportunity cost* jika seorang anak bersekolah tampaknya lebih menjadi faktor ekonomi yang dominan yang menyebabkan seorang anak putus sekolah terutama di tingkat SMP. Banyak anak usia SMP, walaupun ada juga mereka yang di usia SD, memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang baik untuk keperluan mereka sehari-hari ataupun untuk bersenang-senang. Dalam kasus ini sekolah tampaknya kurang menarik bagi anak-anak itu.

Jarak merupakan faktor lain yang menyebabkan sejumlah anak, terutama lulusan SD, tidak melanjutkan ke SMP. Ini terutama terjadi pada lokasi yang sulit atau yang tidak ada alat transportasi umumnya. Adanya SD-SMP Satu Atap cukup membantu sebagian dari mereka yang sebelumnya tidak bisa mengakses SMP. Namun, karena sekolah ini baru ada di sebagian kecil wilayah yang memerlukannya, misalnya hanya satu di setiap kecamatan, masih ada mereka yang tetap tidak bisa mengakses sekolah karena faktor jarak.

Kebijakan lain yang diprakarsai oleh Depdiknas sebelum SD-SMP Satu Atap untuk meningkatkan akses terhadap mereka yang tidak bisa atau tidak mau bersekolah di sekolah reguler adalah dengan diadakannya SMP Terbuka, Kejar Paket A setara SD dan Kejar Paket B setara SMP. Sayangnya, karena program-program ini keterlaksanaannya bergantung pada adanya partisipasi anggota masyarakat yang mau melakukan sesuatu atau berkorban untuk peningkatan pendidikan pada lingkungan masyarakat di tempat tinggal mereka, keberadaannya di setiap lokasi yang memerlukannya menjadi tidak terjamin. Selain itu,

kemungkinan terjadi bahwa mereka yang menjadi target, baik pendidikan kesetaraan maupun SMP Terbuka tidak mengetahui adanya lembaga-lembaga yang melaksanakan program itu di lingkungan mereka.

Penyebab lain seorang anak tidak bersekolah adalah faktor budaya. Sebagai contoh adalah sejumlah besar masyarakat Sampang yang lebih menghargai pendidikan di pesantren daripada di sekolah. Pada mereka yang lebih menyukai belajar di pesantren, pendidikan non-formal setara SD (ULA) dan setara SMP (WUSTHO) juga mulai dikembangkan sejak tahun 2006.

Pada faktor budaya yang lebih ekstrem, yaitu lembaga sekolah sama sekali ditolak, terdapat pada beberapa suku di Indonesia. Salah satunya adalah Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penolakan Suku Baduy dalam ataupun luar, baik terhadap lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Walaupun sebetulnya ada di antara mereka yang sebetulnya berminat untuk menimba ilmu seperti anak atau orang lainnya, ikatan adat tidak memungkinkan keinginannya itu terpenuhi. Keaksaraan fungsional yang pada beberapa tahun terakhir diusahakan oleh beberapa anggota Suku Baduy yang mempunyai keberanian untuk mengajak anak-anak untuk bisa membaca dan menulis tampaknya belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah.

Selain sebab-sebab di atas ada berbagai sebab lain yang jelas memengaruhi partisipasi anak dalam bersekolah, tetapi belum dikaji secara lebih dalam oleh studi ini. Sebagai contoh, anak-anak dari suku yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya terutama di hutan, anak-anak yang menyandang cacat atau kebutuhan khusus lainnya (misalnya karena autis dan disleksia), dan anak-anak yang hidup di jalanan dan/atau harus bekerja adalah anak-anak yang mempunyai kondisi yang sulit untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti itu tampaknya belum optimal. Sumbangan yang diberikan untuk peningkatan partisipasi belumlah optimal. Kendala utamanya adalah kebergantungan pada partisipasi anggota masyarakat untuk mengelola pelaksanaan kebijakan-kebijakan tadi. Selain itu, informasi tentang keberadaan program-program yang berkaitan dengan penuntasan Wajar itu seringkali tidak diketahui oleh anggota masyarakat yang dituju.

- C. Program-program pendidikan dasar yang ada di sekitar lingkungan kelompok anak usia 7 s.d. 15 tahun.

Dalam rangka mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, selain melalui jalur pendidikan formal (SD/MI, dan SMP/MTs), pelayanan Dikdas diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan nonformal, yaitu Program Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD, dan Paket B setara SMP. Sejak dicanangkan program Wajar Dikdas 9 Tahun, program Paket A dan Paket B yang semula hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, perannya dioptimalkan

untuk melayani anak usia Dikdas (7--12 tahun dan 13--15 tahun). Dengan pola yang hampir sama, Depag juga mengembangkan jalur pendidikan dasar non formal bercirikan agama, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Ula (setara MI) dan Wustha (setara MTs).

Jumlah layanan yang tersedia untuk tingkat SD/setara jauh lebih baik dibanding dengan tingkat SMP/setara. Bila jumlah desa per kecamatan digunakan sebagai pembagi untuk menghitung tingkat rasio pelayanan, maka rasio jumlah SD/MI dengan jumlah desa rata-rata mencapai angka 2, artinya di setiap desa terdapat 2 SD/MI. Sedangkan untuk tingkat SMP/setara, rata-rata hanya 0.6, artinya 3 SMP/MTs hanya melayani penduduk dari 5 desa. Bahkan di salah satu kecamatan ada yang hanya memiliki 7 SMP/setara untuk melayani penduduk dari 20 desa.

D. Kebutuhan utama dan kebutuhan pendidikan anak usia 7 s.d. 15 tahun

Dari berbagai penyebab yang diuraikan pada bagian sebelumnya, ada perbedaan dan kesamaan kebutuhan utama pada anak-anak yang putus sekolah antara mereka yang di SD dan di SMP. Untuk anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD, sekolah yang lebih ramah terhadap anak tampaknya merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan agar mereka lebih tertarik untuk tetap di sekolah sampai lulus. Tanpa sekolah yang lebih ramah dengan anak, kegiatan untuk mendapatkan uang dengan cara ngelimbang akan tetap menjadi godaan yang sangat besar bagi anak.

Keberadaan sekolah yang membuat anak nyaman dan bisa belajar secara efektif ini sangat penting, apalagi di sekolah seperti di SD Rias. Berbeda dengan mereka yang mempunyai orang tua dengan aspirasi pendidikan yang tinggi, yang dengan segala upaya berusaha membantu anaknya belajar, banyak anak di dusun Rias sekolah bergantung sepenuhnya pada sekolah dalam belajarnya. Sulit mengharap orang tua mereka untuk membantu mereka mengerjakan PR ataupun untuk mengeluarkan biaya untuk les mereka.

Untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak tidaklah mudah, walaupun tidak mustahil. Modal utamanya adalah guru karena merekalah yang memegang peran utama untuk menciptakan sekolah yang efektif dan inklusif (http://www.unicef.org/lifeskills/index_7260.html). Di masa lalu seringkali guru memberikan alasan bahwa karena mereka mengejar target kurikulum nasional, waktu untuk memberikan waktu lebih untuk sebagian anak yang memerlukan bantuan khusus, baik akademis maupun nonakademis menjadi terbatas sekali atau tidak ada. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mulai berlaku sejak tahun 2006, tampaknya bisa mengubah kondisi guru yang sebelumnya hanya melaksanakan kurikulum nasional yang mungkin tidak memperhitungkan kondisi di lingkungan sekolahnya. Hal ini bisa terjadi jika guru mendapat dukungan masyarakat, Dinas Pendidikan ataupun Depdiknas untuk mengembangkan dan melaksanakannya.

Walaupun di tingkat SMP hanya ada satu anak yang penyebab putus sekolahnya tidak suka dengan sekolah di dekat rumahnya, tidak berarti bahwa konsep sekolah yang ramah terhadap anak tidak relevan di tingkat SMP.

Di tingkat SMP, jarak masih menjadi hambatan bagi sebagian anak untuk bersekolah. Kecamatan Toboali mempunyai 20 SMP karena wilayah yang luas ada sejumlah anak yang belum terjangkau. Keberadaan SD-SMP Satap sangat membantu untuk mengatasi hambatan jarak, tetapi bagi sebagian anak letak sekolah itu masih terlalu jauh. Di samping itu, karena fasilitas yang terbatas (guru, tidak ada listrik), sekolah ini menjadi kurang menarik untuk sebagian anak.

- E. Strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka.

Didasari pada temuan-temuan sebelumnya, beberapa strategi yang perlu dikembangkan lebih lanjut, antara lain adalah

1. Bagaimana menciptakan suasana sekolah agar menarik bagi siswa; perlu penambahan sekolah (kasus Sambas); Metode belajar sambil bermain/menyenangkan tidak perlu harus menunggu dengan sarana yang lengkap "*child friendly school*"; *inclusive education* (Bangka Selatan); kerja sama dengan penyedia kursus bordir/"Juki" (Garut)
2. Pendekatan kepada orang yang ditokohkan di lingkungan masyarakat setempat. misalnya tokoh agama (kasus Sampang);
3. Pendekatan *multi grade teaching* (satu guru mengajar anak dari berbagai kelas);
4. Pendekatan komprehensif (kompeksitas) pendidikan yang melibatkan berbagai *stakeholder*.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Sebagian besar anak usia 7--15 tahun yang tidak sekolah didominasi oleh anak yang sudah tamat SD/MI, tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Latar belakang keluarga mereka umumnya berasal dari orang tua yang juga memiliki tingkat pendidikan rendah (sebagian besar tidak tamat SD/MI), tingkat penghasilan rendah dengan penerimaan yang tidak menetap, serta bekerja di sektor informal.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, umumnya faktor tersebut saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut adalah ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan, jauhnya jarak dari rumah ke sekolah, rendahnya aspirasi dan motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan, dan faktor budaya.

Jumlah layanan yang tersedia untuk tingkat SD/setara jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat SMP/setara. Rata-rata rasio jumlah SD/MI per desa rata-rata mencapai angka 2, artinya di setiap desa rata-rata terdapat 2 SD/MI. Adapun untuk tingkat SMP/setara, rasionya hanya 0.6, artinya 3 SMP/MTs hanya melayani penduduk dari 5 desa.

Beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk mengatasi banyaknya anak yang putus sekolah (di SD dan SMP), dan tidak melanjutkan dari SD ke SMP antara lain adalah perlu menciptakan suasana sekolah agar menarik bagi siswa, metode belajar sambil bermain/menyenangkan, *child friendly school*, *inclusive education*, kerja sama dengan

penyedia kursus bordir/"Juki", pendekatan kepada orang yang ditokohkan di lingkungan masyarakat setempat. misalnya tokoh agama, dan pendekatan *multi grade teaching* (satu guru mengajar anak dari berbagai kelas);

B. Rekomendasi Kebijakan

SD-SMP Satu Atap perlu diperbanyak, bahkan perlu dikaji untuk kemungkinan kedua sekolah itu di bawah satu manajemen, tidak hanya di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau, tetapi juga di daerah lain.

Perluasan lembaga pendidikan dasar akan menjadi sangat mahal jika dalam satu lembaga hanya terdapat sedikit siswa karena rasio guru:siswa menjadi sangat kecil. Untuk mengatasi hal itu perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan pendekatan *multi-grade teaching*. Dengan pendekatan ini guru diharapkan akan memperoleh bekal kemampuan dan sarana penunjang yang relevan untuk mengajar siswa-siswa dari lebih dari satu kelas yang berbeda.

Pengembangan sekolah yang ramah terhadap anak perlu dilakukan agar anak merasa nyaman dan bisa berpartisipasi dalam belajar. Anak-anak yang selama ini putus sekolah karena 'malas', 'bodoh', atau cacat diharapkan menjadi lebih betah di sekolah karena sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi anak serta dengan guru-guru yang bisa mengakomodasi perbedaan yang ada.

Pada suku-suku terasing, program keaksaraan fungsional perlu lebih digalakkan bekerja sama dengan anggota masyarakat yang mempunyai minat dan akses untuk berhubungan dengan suku-suku tersebut. Berbagai dukungan terhadap mereka, misalnya buku-buku, harus dijamin penyediaannya sehingga orang-orang seperti Sarpin (anggota Suku Baduy luar yang mengajar anak-anak sukunya membaca dan menulis) serta Butet (yang mengajar anak-anak rimba) menjadi lebih mudah menjalankan tujuan mulia mereka.

PUSTAKA ACUAN

Freire, Paulo, 1989. *Education for Critical Consciousness*. New York: Continuum.

Locheed, 1987. *Participation in Schooling: Determinants and Learning Outcome in Nepal*. Economics and Development Cultural Change.

Ministry of National Education. 2008. *Reaching the Unreach in Educational Development: Indonesia's Experiences*. Jakarta: Ministry of National Education.

Pusat Statistik Pendidikan, 2008. *Data APK dan APM SMP/Setara*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Suwarjani, 2008. *Laporan Penelitian Lapangan Pengkajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan untuk Menggapai Layanan Pendidikan Kepada Anak yang Selama ini Tidak Terlayani: Kasus di Kabupaten Bangka Selatan*. Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang Depdiknas.

Tilaar, H.A.R., 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.